



Peran Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Paloh Naga Kec. Pantai Labu

Ayu Mentari^{1*}, Mardian Idris Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{1*}ayumentary0@gmail.com, mardianidris07@gmail.com²

Info Artikel

Masuk:

01 Jan 2024

Diterima:

06 Jan 2024

Diterbitkan:

14 Jan 2024

Kata Kunci:

Peran Politik,
Masyarakat,
Pemilihan Kepala
Desa.

Abstrak

Setiap Masyarakat mempunyai pemilih yaitu satu suara baik kelembagaan maupun pribadi dan ada pulak pemilihan melakukan kecurangan dengan menyogok dan ada juga yang jujur bahwa satu-satunya cara untuk melakukan kejujuran dengan harus digunakan untuk mempengaruhi perubahan. Pemilihan Kepala Desa sesuatu hal yang merupakan bentuk politik lokal yang ditingkatkan desa yang searah dengan tercapainya otonomi desa. Metode yang ingin akan digunakan adalah suatu deskriptif dan kualitatif dari hasil penelitian ini menunjukkan suatu hal tersebut yang Pelaksanaan proses pemilihan kepala desa di Paloh Naga yang akan melalui tahap terkendali Namun, hukum menghalangi proses ini Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa adalah suatu yang pekerjaan dan kebijakan yang menarik bagi masyarakat pedesaan. Komunitas desa yang penuh cinta terhadap wilayahnya, Masyarakat pedesaan memiliki sesuatu yang kesadaran politik yang lebih rendah dan dibandingkan masyarakat desa pengasih yang Memasuki kawasan perkotaan. serta keyakinan politik tentang pemerintahan desa. Hal ini juga akan terbagi menjadi dua sisi: kepercayaan terhadap pemimpin juga dan pandangan masyarakat terhadap pemimpin sistem politik. Hal lain akan menyangkut faktor-faktor yang akan mempengaruhi partisipasi dan Kebijakan masyarakat seperti kemauan politik, tingkat Pendidikan dan juga tingkat ekonomi.

PENDAHULUAN

Jika pemimpin desa yang tepat adalah yang berdaulat dan kepercayaan dan jika kepercayaan itu dapat dipelihara dan dilatih secara utuh dan dalam bentuk kedudukan masyarakat yang sangat tinggi dan harus sesuai dengan konstitusi, maka pemerintahan yang akan dapat berfungsi dengan baik. Ini tentang soal kesejahteraan dan dalam menyatukan orang-orang. Demokrasi yang efektif dapat memerlukan kesadaran masyarakat akan makna dan peran warga negara dalam infrastruktur politik.

Hal ini juga dapat terlihat pada gerakan-gerakan di masyarakat dan dimana akan keterlibatan masyarakat dapat diekspresikan melalui berbagai cara bentuk tindakan, yang mulai dari pernyataan sikap, dan penyampaian juga pada pendapat melalui media sosial, hingga protes yang sering kali berujung pada Tindakan. Pada saat kecenderungan yang terjadi, pada suprastruktur politik juga terlihat jelas, yaitu upaya yang mewujudkan peran-peran pemerintah dalam meningkatkan kehidupan bagi masyarakat menjadi lebih baik, dan juga jarak antara pemerintah dan masyarakat semakin dekat. Demokrasi juga tergantung seberapa dan sejauh mana partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi politik merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam menjalankan kedaulatannya berdasarkan kesadaran diri. Dalam hal ini partisipasi politik merupakan wujud kepentingan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partisipasi politik masyarakat juga mencakup pada pengungkapan dan keterlibatan pikiran, pengetahuan, dan keterampilan sebagai partisipasi sukarela masyarakat untuk kepentingan bersama dan patriotisme. Partisipasi politik masyarakat dalam berpolitik penting untuk mencapai kematangan demokrasi. Idealnya, partisipasi politik masyarakat dapat merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan penyelenggaraan publik menjadi efektif. Dan Akan tetapi bahwa partisipasi politik masih pada dalam tingkatan pemilihan umum semata. Hal ini juga berlaku untuk pemilu bagi tingkat nasional, lokal, dan desa. Dalam hal ini, masyarakat lokal berperan aktif dalam menyelenggarakan proses pemilihan umum. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu merupakan indikator positif baiknya kinerja masyarakat dalam partisipasi politik. Partisipasi politik dimungkinkan karena masyarakat menyadari bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan seluruh warga negara.

METODE

Penelitian ilmiah menggunakan pendekatan kualitatif. Proses penyelidikan dan pemahaman sebagai kuantitatif yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena yang terjadi pada masyarakat. Metodologi kualitatif menghasilkan data perilaku yang diamati. Pemilihan kepala desa paloh naga adalah subjek penelitian ilmiah, yang dilakukan dengan metodologi kualitatif dan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ilmiah dianalisis secara deskriptif analitik. Penelitian ilmiah mencoba menjelaskan partisipasinya politik masyarakat dan semua hal yang mempengaruhinya.

Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan penelitian sebagai instrumen penelitian. Data tertulis yang ada adalah sekunder menggunakan metodologi pengumpulan data, dan data hasil observasi langsung berupa hasil pengamatan sekaligus ikut aktif dalam aktivitas informasi. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang diinformasikan balik informasi rekomendasikan maupun informal tunjuk. Sedangkan metodologi penelitian lapangan diawali dengan orientalis, yang mengacu pada upaya persiapan yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik dan pemahaman antara peneliti dan informasi. Metodologi penelitian kualitatif yang menghasilkan khalian terhadap ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang bersifat sedang dikenali oleh seorang individu, sekelompok orang, suatu masyarakat, atau suatu organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif atau kualitatif. Jelaslah bahwa metodologi deskriptif merupakan penafsiran fakta yang akurat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat serta dampak yang dirasakan masyarakat dan situasi saat ini. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan hubungan, aktivitas, sikap-sikap, pandangan-pandangan, proses yang sedang berlangsung, serta manfaat dan kerugian dari suatu fenomena tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa

Hal ini berlaku untuk pemilu tingkat nasional, lokal, dan desa. Dalam hal ini, masyarakat lokal berperan aktif dalam menyelenggarakan proses pemilihan umum. Adanya partisipasinya masyarakat dalam proses pemilu merupakan indikator positif baliknya kinerja masyarakat dalam partisipasinya politik. Partisipasinya politik dimungkinkan karena masyarakat menyadarinya bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan seluruh warga negara.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Ayat 1 sampai dengan 5 UUD 1945, kepala desa pada umumnya dipilih langsung oleh penduduk desa dari antara calon-calon yang memenuhi syarat, dan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan oleh panitia pilkades. Hal tersebut dikarenakan pada Pemilihan Kepala Desa masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sudah mereka ketahui siapa dan bagaimana calonnya, menyebabkan Pilkades lebih rasional dan sekaligus emosional. Akibatnya ikatan emosionalnya tidak terlalu terbangun kuat. Di Desa mereka akan menarik perhatian masyarakat agar ikut berpartisipasi lagi dengan menyuarakan hak pilihnya melalui layanan cara yaitu para calon kepala Desa dilakukan dengan berpakaian khas yang ada di Indonesia diramaikan dengan adanya pelintas senilai di tempat pemilihan yang dilakukan di lapangan Desa, disana mereka akan duduk berdampingan lalu di melelahkan dengan berbagai langkah acara seperti penampilan tarian adat tradisional, sakura, pencak silat yang dilakukan kepada laskar Lingkaran, dan acara doorprize sebagai acara penutup nantinya setelah pengumuman kepala desa.

Berdasarkan teori partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan kesertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, yang diterapkan dalam pemilihan kepala desa. Salah satu syarat untuk melmbangun pemerintah yang demokratis adalah partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dapat beragam, tetaplh partisipasi yang lebih besar dalam Pilkades menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti lomba dan memahami masalah politik dan ikut melibatkan di dalam kegiatan tersebut.

Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Opini dan keyakinan adalah cara seseorang atau sekelompok orang melihat pemerintah itu sendiri. Kepercayaan ini melanjutkan partisipasi yang dapat dipercaya dari seseorang atau sekelompok orang terhadap pemerintah. Bisa menguntungkan jika kelompok masyarakat memiliki partisipasi yang baik terhadap pemerintah. Hubungan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan. Setiap hubungan bergantung pada kepercayaan. Hubungan yang baik terjadi apabila dua pihak saling mempercayai satu sama lain. Namun, kepercayaan ini tidak muncul begitu saja. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan muncul hanya apabila pemerintah dapat membuktikan kinerjanya. Masyarakat Desa Kampung sawah kurang percaya pada pemerintah desanya.

Beberapa masyarakat desa percaya bahwa kekurangan kepercayaan inilah disebabkan oleh rasa kecewa karena mereka hanya diberikan janji politik tetapi tindakan yang dilakukan pemerintah desa tidak sesuai dengan harapan mereka. Menurut masyarakat, janji-janji yang sering diumbar oleh para calon kepala desa selama kampanye hanyalah rayuan. Selain itu, masyarakat menganggap para calon ketika mereka terpilih seringkali tidak pro rakyat; kebanyakan dari mereka lebih mementingkan kepentingan golongan mereka daripada kebutuhan orang yang memilih mereka. Karena itu, seseorang yang terpilih untuk memimpin desa harus amanah dan mementingkan amanah yang diberikan oleh

masyarakatnya. Ini akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa paloh naga Kecamatan Pantai Labu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan adalah penilaian mereka terhadap pemerintah. Untuk memilih pemimpin, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa, diperlukan tingkat kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kepercayaan akan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara, termasuk Pemilihan kepala desa. Masyarakat akan selalu berpartisipasi dalam setiap acara; mereka akan menilai bagaimana pemerintahan melakukan tugasnya dengan baik sehingga mereka dapat memberikan kepercayaan kepadanya; dan mereka berharap agar suara mereka atau aspirasinya mereka didengar dan diwujudkan demi kepentingan bersama. Aktivitas sosial politik Tuan Arsyad, terutama dalam organisasi al-Washliyah, sangat penting untuk kemajuan dan kemajuan organisasi tersebut sehingga pada tahun-tahun berikutnya dan sebelum tahun 90-an, organisasional tersebut menempati 1 urutan ketiga dalam jumlah anggota dan jaringannya.

Membentuk Pemilihan kepala desa

BPD Kecamatan Pantai labu, Kabupaten Deli Serdang, membentuk panitia pemilihan untuk mencalonkan dan memilih kepala desa. Panitia ini terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dan agama. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Pantai Labu juga menetapkannya.

a. tugas panitia sebagai berikut

1. Merencanakan, mengkombinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
2. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada bupati melalui camat.
3. Registrasi lagi dan penetapan Pemilihan.
4. Membuat panitia pemungutan suara dengan menggunakan surat keputusan.
5. Menginformasikan masyarakat desa dan panitia pemungutan suara tentang pemilihan kepala desa.
6. Melakukan penjarangan dan penyaringan kandidat yang akan dipilih.
7. Menetapkan kandidat yang memenuhi persyaratan.
8. Mengatur prosedur dan mengawasi pelaksanaan Kampanyekan.
9. Menentukan jumlah kotak suara, tempat pemungutan suara, dan surat suara.
10. Menentukan prosedur untuk melaksanakan pemilihan.
11. Melancarkan surat suara, membuat kota suara, dan menyediakan peralatan Pemilihan. 12. Rekapitulasi hasil perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan.
12. Menjaga calon kepala desa yang terpilih.
13. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pemilihan.

b. Adapun kegiatan panitia pemilihan kepala desa di lapangan sebagai berikut:

1. Mengawasi seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
2. Menerima laporan pelanggaran.
3. Mengambil bagian dalam proses pemilihan kepala desa.
4. Mengubah semua yang terjadi lagi selama Pemilihan calon Kepala desa.
5. Mengevaluasi proses pemilihan Kepala Desa.
6. Berilah tahu ketua BPD tentang hasil pengawasan.

Temuan penelitian Temuan menunjukkan ini menunjukkan bahwa sistem Pilkades pelmelril tahun Indonesia perlu diperkuat bahwa sistem Pemilihan kepala desa pemerintah Indonesia perlu diperkuat. Sebagai salah satu pemilihan realizm yang setara dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah, penguatan keseluruhan tersebut dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Pemilihan kepala desa. Selain itu, pernyataan kedudukan dapat dilakukan dengan membuat undang-undang khusus yang mempengaruhinya penyelenggaraan Pilkades Di Indonesia.

Temuan penelitian ini juga mendukung gagasan bahwa kelompok penyelenggara Pemilihan kepala desa dapat dibentuk dengan menunjuk KPU dan Bahwasanya sebagai dua bagian dari kelompok penyelenggara Pemilihan desa. Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan per undang-undang yang konsisten dan ketat terhadap berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam korupsi politik, serta partai politik, agar dapat melakukan korupsi. mengembangkan praktik penegakan korupsi yang lentils dan jujur.

KESIMPULAN

Proses pemilihan kepala desa Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang diawali dengan pemilihan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selamat sepintas memang tidak ada yang salah dalam pemilihan inil, tetapi lebih kalau kita lihat lebih jauh lagi banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam pemilihan tersebut salah satunya adalahnya pengawasan untuk mengantisipasi kecurangan dan money politic, lemahnya pemikiran masyarakat bisa menentukan pilihan hanya dalam saja dan masyarakat memilih tidak berdasarkan potensinya. penulis penyebab pemilihan langsung dilaksanakan di desa kurang efektif, maupun membangun para kandidat dalam pergaulannya sehari-hari dengan masyarakat tersebut. pemilihan kepala desa, calon kepala desa harus mempertimbangkan berbagai testimonial yang ditampilkan oleh masyarakat agar dapat dianggap sebagai wakil kepala desa , khususnya besaran biaya lamaran yang harus dibayarkan sebagai kepala desa . uang jaminan yang harus dibayarkan sebagai desa. Dalam artikel ini, penulis

membahas kesulitan - kesulitan yang dihadapi dalam proses pemilihan kepala desa. Ketua Didesa di nilai , terutama bentuk politik uang terkesan tidak karena sering terjadi lagi korupsi , politik uang atau politik kecurangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag selaku Dosen Mata Kuliah Politik Islam, dan untuk semua rekan yang terlibat terhadap proses penulisan jurnal dari awal sampai akhirnya publikasi karya ilmiah. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca untuk lebih selektif dalam menentukan pilihan pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardian Idris Harahap, Studi terhadap pemikiran dan kiprah sosial politik syekh M. Arsyad Thalib Lubis (1908-1972, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 Undang-undang Dasar 1945 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (SALINAN), (Online), tersedia https://www.dpr.go.id/dokjdlh/document/uu/UU_2014_6.pdf.Diakses pada Selasa 24 Oktober 2023
- Sosialismanto, Duto. Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa. (Yogyakarta) Laper Pustaka Utama, 2001), h. 56
- Sumiyati, "Money Politic Menjangkiti Pill Kadels," Poskota, diakses 24 April 2022, <https://poskota.co.id/2021/10/14/monely-polilitic-menjangkiti-pilkades>
- Al-Maududi, Abu A'la. Hukum dan Kontribusi Sistem Politik Islam, t.pn. Mizan, 1990 cet-1. Anshari, Endang Saifuddin Pokok-Pokok tentang Islam. Jakarta : Usaha Enterprise, 1976.
- Azra, Azyumardi. IslamSubtantif : Agar Umat tidak Jadi Buruk. Bandung : Mizan, 2000.
- Bakhri, Syaiful. Ilmu Negara : Dalam Konteks Negara Hukum Modern. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3HI) Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Jakarta, 2010.
- Borrong, Robert P. Etika Politik Kristen : Serba-serbi Politik Praktis. Jakarta: Unit Publikasi Dan Informasi (UPI) & Pusat Studi Etika (UPE) 2006.
- Busroh, Abu Daud. Ilmu Negara. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001.
- Chaniago, Andriano A. Teori Politik Modern. Jakarta :Rajawali Pers, 2010. Dapasi. Ilmu Politik : Teori dan Praktik. Yogyakarta : Garaha Ilmu, 2010
- Efendi, Sulaiman. Kiprah dan Pemikiran Tokoh-Tokoh Bangsa. Jogjakarta : IRCiSoD, 2014.
- Effendi, Edy A. Dialog dan Wacana Keterbukaan, pengantar dalam Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan : Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Jakarta : Paramadina, (1998).